



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

**RENCANA STRATEGIS
{RENSTRA}
2025 - 2029**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KONAWE**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa mengucapkan Alhamdulillah, kami Tim Penyusun Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe telah menyelesaikan pekerjaan untuk menyusun Renstra tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparat Dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat pada umumnya, di Bidang Komunikasi dan Informatika pada khususnya. Hal ini sejalan dengan Visi Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Konawe Periode 2025 – 2029 yaitu “ **KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN**”. Visi tersebut harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua SKPD sebagai kebijakan implementatif. Penyusunan Renstra ini memuat Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, Program Operasional, Kegiatan dan langkah – langkah capaiannya di bidang Komunikasi dan Informatika dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dalam membangun Kabupaten Konawe 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu saran dan masukan tetap kami terima. Semoga dapat bermanfaat khususnya dalam membangun Kabupaten Konawe kedepan.

Unaaha,

2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KONAWE



Drs. H. MUH. AKIB RAS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670831 199303 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	13
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
3.1. Tujuan dan Sasaran Daerah	51
3.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	55
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan	60
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	64
BAB VIII PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel II 1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Konawe Per Juni Tahun 2025.....	23
Tabel II 2 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Per Juni 2025	24
Tabel II 3 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Berdasarkan pangkat/golongan Per Juni 2025.....	24
Tabel II 4 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Berdasarkan pendidikan Per Juni 2025.....	25
Tabel II 5 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran.....	26
Tabel II 6 Capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	27
Tabel II 7 Capaian IKU 2025 – 2029.....	28
Tabel II 8 Capaian IKK 2020 – 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe	29
Tabel II 10 Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Isu Isu Strategis	38
Tabel II 11 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah.....	39
Tabel II 12 Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	45
Tabel III 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029	53
Tabel III 2 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe dengan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029	57
Tabel III 3 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Tahun 2025 - 2029	60
Tabel III 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra.....	63
Tabel IV 1 Matriks Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029.....	66
Tabel IV 2 Perumusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029.....	77
Tabel IV 3 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..	83
Tabel IV 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika.....	85
Tabel IV 5 Capaian IKK 2025 – 2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	8
Gambar 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah .	8
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe	15
Gambar 5 Cascading	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperkuat arah kebijakan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menjawab tantangan dan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat. Perubahan teknologi digital telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pola komunikasi sosial dan ekonomi. Tuntutan terhadap pemerintahan yang terbuka (*open government*), efisien, dan berbasis data semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap akses informasi yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini menempatkan sektor komunikasi dan informatika sebagai pilar strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Renstra, secara konseptual, adalah dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang disusun untuk kurun waktu lima tahunan dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam menyusun Renstra perangkat daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti RPJPD dan RPJMD. Selain itu, dokumen ini juga mengacu pada kebijakan nasional di bidang TIK, termasuk arah kebijakan transformasi digital yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Induk Transformasi Digital Nasional. Dalam konteks lokal, Renstra Dinas Kominfo memiliki nilai strategis karena berperan dalam mendorong penguatan infrastruktur digital, penyebaran informasi pembangunan, pengelolaan data sektoral, perlindungan data pribadi, serta pemberdayaan masyarakat informasi yang inklusif dan partisipatif. Renstra ini juga menjadi pedoman utama dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, arah kebijakan nasional dan daerah, serta perkembangan kebutuhan masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai instrumen perencanaan yang visioner dan responsif dalam menjawab tantangan era digital. Dokumen ini diharapkan mampu memperkuat posisi Dinas Kominfo sebagai motor penggerak transformasi digital daerah, jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menjaga integritas informasi publik di tengah derasnya arus informasi global.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe merupakan Dinas yang baru di Kabupaten Konawe, eksistensinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang sebelumnya Bidang Komunikasi dan Informatika berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe.

Didalam Undang – Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa semua Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar, dan pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan amanat tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe telah menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029 yang penyusunannya bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029, yang mana nantinya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe yang telah ditetapkan ini akan menjadi pedoman Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Tahun 2025 - 2029 ini memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029. Sejalan dengan kondisi sekarang diawal jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah memiliki program kerja, visi, misi dan kebijakan untuk periode kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas.

Selain itu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe ini juga untuk menterjemahkan visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang komunikasi dan Informatika sehingga kesuksesan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam sector pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan performan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe itu sendiri.

Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Diskominfo untuk periode lima tahun, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta arah kebijakan pembangunan nasional. Penyusunannya merupakan amanat regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang relevan. Regulasi ini memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

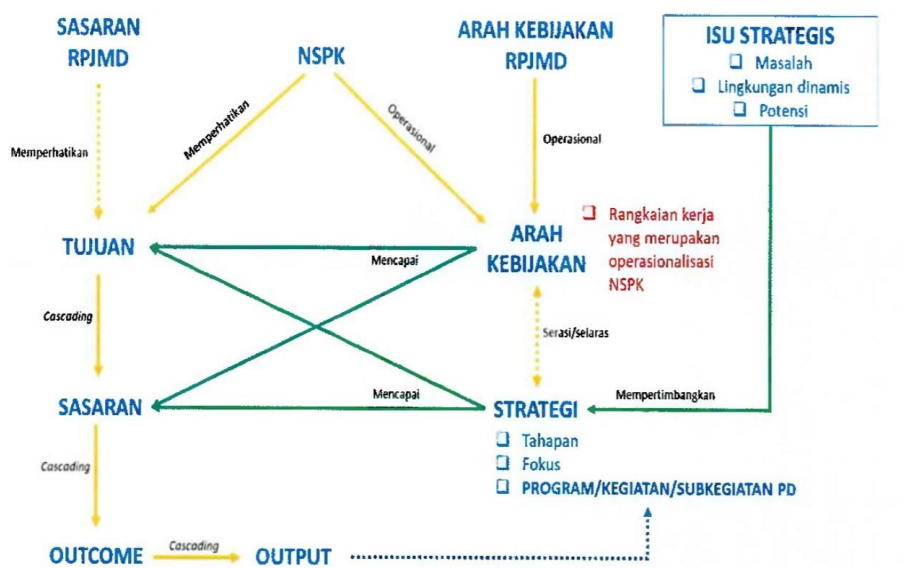
Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan perangkat daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1 – 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, bersifat indikatif dalam rangka mendukung visi, misi Kepala Daerah serta untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi dinas.

Adapun fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Tahun 2025 - 2029 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah adalah :

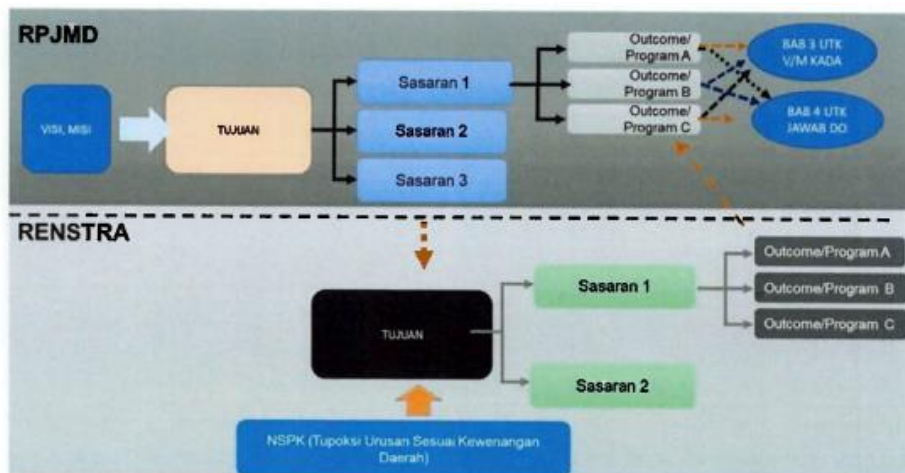
1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai;
2. Digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe yang diimplementasikan kedalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 - 2029 ;
4. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe agar lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi lembaga perangkat daerah dan masyarakat;

5. Merumuskan fokus, strategi dan langkah – langkah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, dan
6. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja dan rencana kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe.

Adapun proses tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Tahun 2025 - 2029 dan Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra serta hubungan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah maupun regulasi teknis di bidang komunikasi dan informatika. Adapun dasar hukum penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (perubahan UU Telekomunikasi melalui UU Cipta Kerja)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagai dasar kelembagaan sektor komunikasi dan informatika
- 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 10) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 12) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
- 13) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Pengembangan Aplikasi SPBE
- 14) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang RTRW Kab. Konawe 2014-2034;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 - 2045
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMN Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe tahun 2025 - 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang memuat gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan dan tolok ukur kinerja sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 - 2029 sekaligus untuk mendukung tercapainya visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe tahun 2025 - 2029, adalah :

- 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;

- 2) Sebagai landasan operasional untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe agar lebih fokus dan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- 3) Mewujudkan sinergitas seluruh aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 4) Memudahkan seluruh jajaran aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
- 5) Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe rentang tahun 2025 - 2029 .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Gambar Pelayanan Perangkat Daerah
 - A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - B. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - D. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - B. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan RENSTRA PD

3.2. Sasaran RENSTRA PD

3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2030
Melalui IKU Perangkat Daerah

4.6. Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Melalui IKK

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA****2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, mengacu pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mana sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe adalah merupakan Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian pada perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe.

Dalam menjalankan urusannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah terbagi menjadi dua urusan, yaitu urusan Komunikasi dan Informatika serta urusan Statistik dan Persandian, yang diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah yang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe, ditetapkan sebagai berikut :

Tugas Pokok.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren di bidang Komunikasi dan Informatika pada Kabupaten Konawe.

Fungsi.

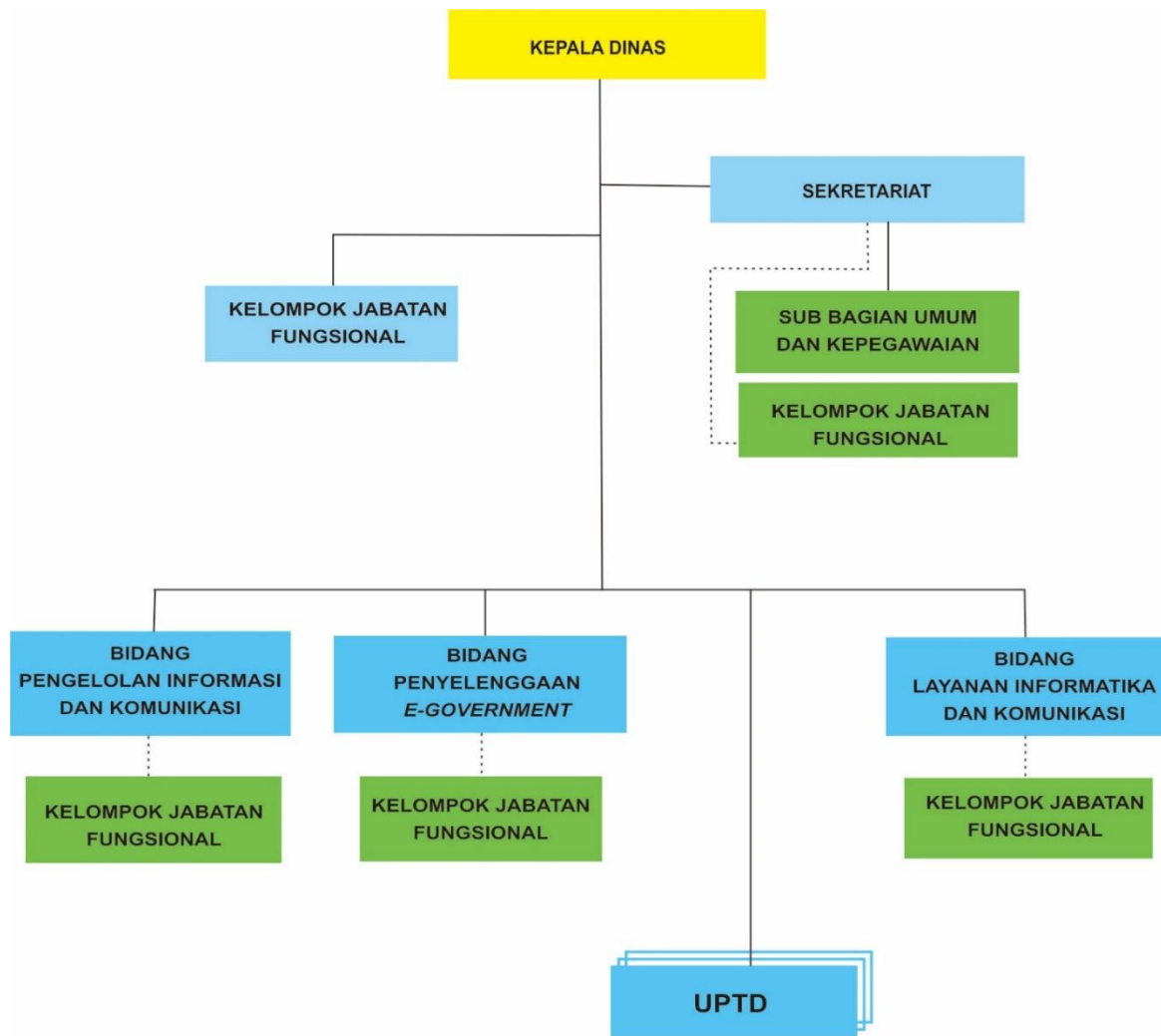
Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi di bidang komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain di bidang komunikasi dan Informatika yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan / Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Susunan/struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- e. Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi;
- f. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka menjalankan kewenangan yang diberikan, maka penjabaran tugas, fungsi pemegang jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :

Uraian Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan tugas desentralisasi Otonomi Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai prosedur yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - c. Memberikan rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika terhadap Instansi dan Lembaga lainnya yang terkait.
 - e. Memimpin, mengawasi, menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.
 - f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, serta pengendalian penyelenggaraan program kegiatan.
 - g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
 - h. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - i. Memantau pelaksanaan kegiatan dibidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Layanan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik serta Penyelenggaraan e-Government.
 - j. Menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah.
 - k. Menyarankan saran kepada Kepala Daerah tentang kebijakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.
 - l. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hasil penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika untuk disampaikan kepada Kepala Daerah serta unsur-unsur terkait lainnya untuk bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe dibidang ketatausahaan, yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, urusan kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan.
 - 2) Merumuskan program kegiatan dibidang ketatausahaan sesuai standart dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atasan.
 - 3) Melakukan koorclinasi teknis terhadap satuan kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program kegiatan dibidang ketatausahaan.
 - 4) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dibidang ketatausahaan.
 - 5) Melaksanakan pembinaan dan mengendalikan kegiatan dibidang ketatausahaan, dengan menjabarkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan terhadap sub-sub bagian dibawahnya yang meliputi :
 - a) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi surat-menyurat.
 - b) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi barang/perengkapan kantor.
 - c) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pendayagunaan ketenagakerjaan dibidang Komunikasi dan Informatika.
 - d) Perencanaan program kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - e) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi bahan pustaka.
 - f) Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - g) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan, pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan.
 - h) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai.
 - i) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - j) Penyusunan materi Perundang-Undangn Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

- d. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang penyusunan program dan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- f. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan operasional sesuai standar kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 2) Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap satuan-satuan kerja yang terkait.
 - 3) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai standar dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atasan.
 - 4) Menyelenggarakan rencana kegiatan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan, yang meliputi:
 - a) Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, agenda surat masuk dan surat keluar, ekspedisi surat keluar, pengetikan/perekaman konsep surat atau naskah dinas, penggandaan dokumen, serta pemeliharaan dan perawatan kearsipan.
 - b) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi perpustakaan, serta pembuatan konsep usul pengadaan bahan pustaka yang relevan dengan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika.
 - c) Penyelenggaraan urusan rumah tangga Dinas Komunikasi dan Informatika, penerimaan dan pelayanan tamu, keprotokolan, keamanan dan ketertiban, serta penyiapan bahan penyelenggaraan Rapat Dinas.
 - d) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pegawai atau ketenagakerjaan dalam Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, serta konsep usul pengadaan pegawai / ketenagakerjaan sesuai formasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
 - e) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Pengusulan NIP, Karpeg, Taspen, Usulan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala,

pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, pembuatan DUK, Buku Induk Pegawai, serta pemeliharaan dan perawatan dokumen kearsipan bidang kepegawaian.

- f) Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, promosi, pendayagunaan pegawai, serta mutasi kepegawaian sesuai kebijakan atasan dan petunjuk Kepala Daerah.
 - g) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai, serta pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan biaya perjalanan dinas bekerja - sama dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 5) Menyiapkan bahan dan petunjuk penyelesaian masalah yang diperoleh dalam penyelenggaraan rencana kegiatan operasional dibidang ketatausahaan.
 - 6) Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan rencana kegiatan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, untuk bah.an evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Konawe;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik di Kabupaten;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten;
 - 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikannya oleh Kepala Dinas.
- d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government,

- a. Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Dalam Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten Konawe;
- b. Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

c. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Konawe.
- 2) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Gouemmeni, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Konawe;
- 3) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervise di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Konawe;
- 4) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK , Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e- Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Konawe.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi

a. Bidang Layanan Informasi Dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe dalam

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Konawe, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Konawe dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten Konawe.
- b. Bidang Layanan Informasi Dan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Layanan Informasi Dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Konawe, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Konawe dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Konawe, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten Konawe;
 - 2) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Konawe dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Konawe, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten Konawe;
 - 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Konawe, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Konawe dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Konawe, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten Konawe;
 - 4) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan

akses informasi, Layanan Narna domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Konawe, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Konawe dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Konawe, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten Konawe;

- 5) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Narna domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Konawe, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten Konawe dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Konawe, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten Konawe; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

d. Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

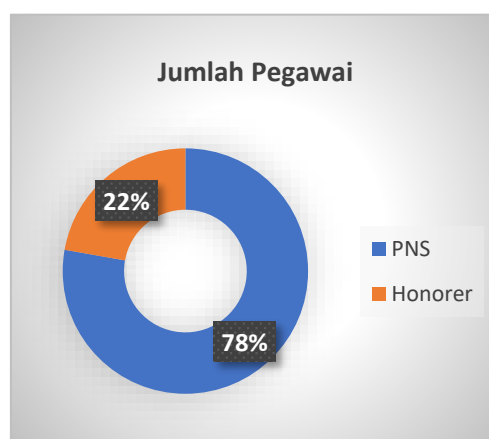
1) Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe berjumlah 42 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Honorer dan pegawai non PNS. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II 1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Konawe Per Juni Tahun 2025

No	Pegawai	Jumlah Orang	%
1	PNS	42	78
2	Honorer	12	22
	Jumlah	54	100



Tabel diatas menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe sebanyak 42

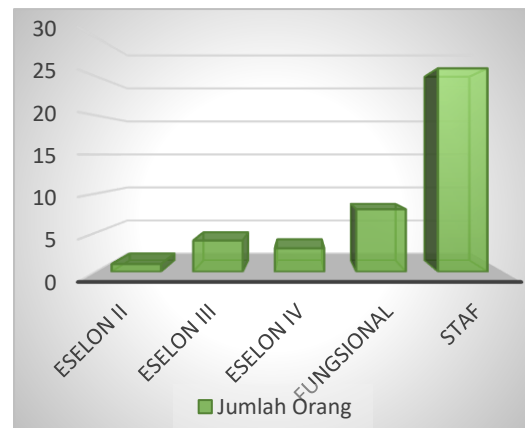
orang dan masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu Tenaga Honorer sebanyak 12 (satu) orang.

b. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah, maka pengisian formasi Jabatan Struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 8 orang. Sedangkan Jabatan Fungsional 8 orang. JF Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang, JF Perencana Ahli Pertama sebanyak 2 orang, JF Pranata Humas Ahli Muda sebanyak 7 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel II 2 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Per Juni 2025

No	Jabatan/Staf	Jumlah Orang	%
1	Eselon II	1	2
2	Eselon III	4	10
3	Eselon IV	3	7
4	Fungsional	8	19
5	Staf	26	62
Jumlah		42	100

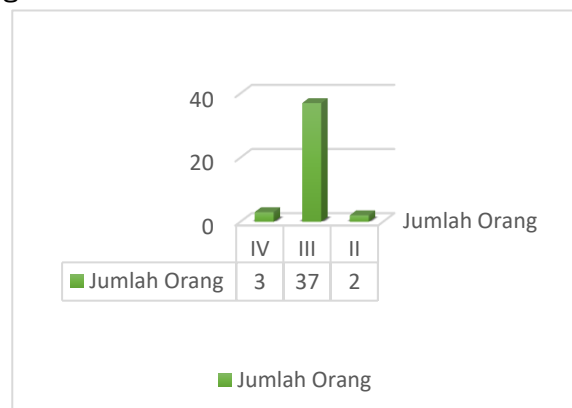


c. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan / pangkat

Dari 42 orang jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe terdapat 7% pegawai yang berstatus golongan IV, 88% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan II sebanyak 5%. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II 3 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Berdasarkan pangkat/golongan Per Juni 2025

No	Golongan	Jumlah Orang	%
1	IV	3	7
2	III	37	88
3	II	2	5
Jumlah		42	100

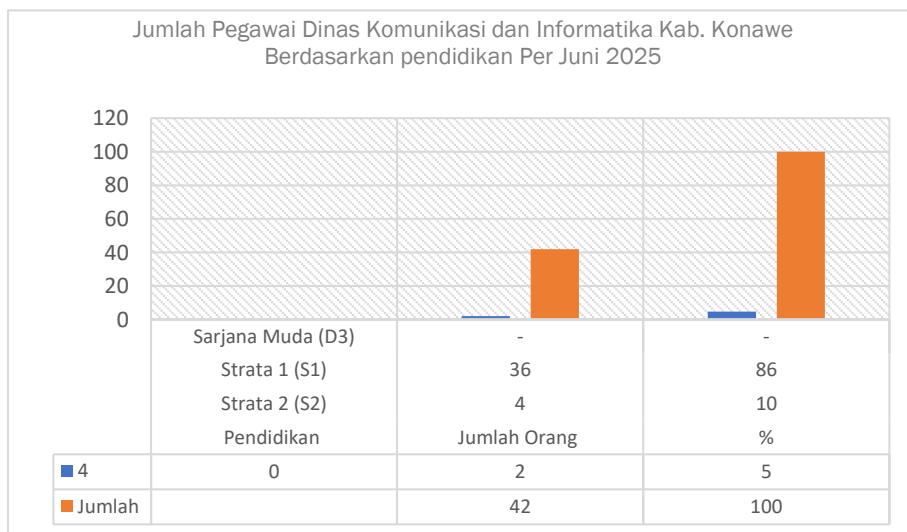


d. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Konawe yang ada, maka status pendidikan dengan Sarjana Strata 2 dan Sarjana Strata 1 lebih mendominasi yaitu sebesar 11% dan 68%. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II 4 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Berdasarkan pendidikan Per Juni 2025

No	Pendidikan	Jumlah Orang	%
1	Strata 2 (S2)	4	10
2	Strata 1 (S1)	36	86
3	Sarjana Muda (D3)	-	-
4	SLTA/SMK	2	5
Jumlah		42	100



2) Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)

a. Kondisi Umum Sarana Kerja

Secara umum sarana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe cukup memadai. Yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan, ruang kerja, ruang media center dan ruang rapat. Adapun data selengkapnya tentang kondisi umum sarana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel kondisi asset.

Tabel II 5 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Jenis Barang Yang Di Beli/diadakan	Banyaknya Barang
1	2	3
1	MEJA KERJA EVAN OFFICE TABLE W/STOREGE 150 CM	2 Unit
2	MEJA KERJA PUTUH NEO DAVOS OFFICE DESK BLACK	1 Unit
3	KURSI KERJA COSMO OFFICE CHAIR LOW BACK	2 Unit
4	LEMARI BERKAS SIMSON FILE CBNT FULL GLAS SLIDE OAK	2 Unit
5	MEJA LAPTOP OLIVER SMALL LEP-DESK	1 Unit
6	MEJA MINI CONTI END TABLE SONOMA OAK	1 Unit
7	Kamera CCTV Outdoor Spesifikasi: TP Link VIGI C340 4MP Full Color Audio Outdoor IP	12 Unit
8	Kamera CCTV Outdoor Spesifikasi: Tp-Link VIGI C5404G VIGI 4MP	12 Unit
9	NAS Storage Spesifikasi: SYNOLOGY DS224+ DiskStation 2 Bay NAS Storage Server Backup Desktop - 2x HAT3300-4Tb	1 Unit
10	NVR TP-LINK VIGI NVR4032H Spesifikasi: NVR IP 32CH TP-LINK VIGI NVR4032H NON-POE	1 Unit
11	Rack Server 12 U Spesifikasi: 12 U	1 Unit
12	Tiang Besi Kamera + Panel Spesifikasi: Pipa Besi 6 meter	12 Unit
13	Mini PC Spesifikasi: Intel i5,ssd 256, Keyboard, Mouse Wireles	2 Unit
14	TV Spesifikasi: 75 Inc	2 Unit
15	Bracket Standing TV Spesifikasi: Bracket Standing TV 65 Inchi	2 Unit
16	Kabel HDMI Spesifikasi: Vention	1 Unit
17	UPS Spesifikasi: 3000VA	1 Unit
18	Router 4G LTE Sim Card Spesifikasi: TL-MR6400 WiFi	12 Unit
19	Aplikasi Monitoring CCTV Spesifikasi: Webgis, Cloud, AI, Mobile	1 Unit

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Urusan Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki

fungsi dalam Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Pelaksanaan Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, serta Pelaksanaan Administrasi di bidang Komunikasi dan Informatika. Secara garis besar, uraian tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe kewenangannya meliputi antara lain :

1. Melaksanakan Pengembangan Aplikasi Informatika, E-Government, dan Teknologi Informatika;
2. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Keterbukaan Informasi; dan
4. Melaksanakan Kegiatan dibidang Persandian.

Pada Renstra 2024-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki indikator kinerja antara lain :

1. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi
2. Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kab. Konawe
3. Persentase kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas Nasional dan Prioritas Daerah

Adapun pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sebelumnya dapat diuraikan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel II 6 Capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024
1	Mewujudkan Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks	2.92
			Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	%	100
			Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di kab. Konawe	%	70
			Persentase kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	%	80

Tabel II 7 Capaian IKU 2025 – 2029
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Kondisi Akhir Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya respon dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi digital	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi Layanan Publik Digital	Persen	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00	80.00
	Meningkatnya Kualitas dan Integrasi Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan	Persen	25	37.5	44	50.0	56	62.5
	Meningkatnya Kapasitas dan Koordinasi Antar-OPD	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Level	0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.5

Untuk capaian IKK Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II 8 Capaian IKK 2020 – 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	CAPAIAN TAHUN 2019		CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2024	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	
16	Kominfo	602	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	x	100%	OPD	0	0	0	0	0	0	14	42	28	85
				Jumlah OPD	OPD	33	33	33	33	33	33	33	33	33			
		603	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang di sediakan oleh dinas kominfo	x	100%	OPD	0	0	0	0	0	14	42	27	82
					Jumlah perangkat daerah	OPD	33	33	33	33	33	33	33	33			
		604	2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	x	100%	OPD	0	0	0	0	0	14	42	27	82
					Jumlah perangkat daerah	OPD	33	33	33	33	33	33	33	33			
		605	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).			Sistem	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		606	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	x	100	Layanan	3	19	3	18.75	3	18.75	6	37.50	16	100.00
				Jumlah Layanan Publik	Layanan	16	16	16	16	16	16	16					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	CAPAIAN TAHUN 2019		CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2024		
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		
		607	1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah perangkat daerah (event), Perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan PM Kominfo No./2015	x 100%	OPD	1	1.56	1	1.56	1	1.56	1	1.56	1	1.56	0	0.00
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah		OPD	64		64	64		64		64		64	64	
		608	2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	x 100%	OPD	2	3.13	1	1.56	1	1.56	0	0	4	6.25	4	6.25
				Jumlah perangkat daerah		OPD	64		64	64		64		64		64	64	
		609	3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	x 100%	OPD	1	1.56	0	0	0	0	0	0	8	12.50	8	12.50
				Jumlah perangkat daerah		OPD	64		64	64		64		64		64	64	
		610	4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	x 100%	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	100.00
				Jumlah layanan		Layanan	16		16	16		16		16		16	16	
		611	5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	x 100%	Layanan	0	0	1	3.03	1	3.03	1	3.03	2	6.06	3	9.09
				Jumlah sistem elektronik		Aplikasi	33		33	33		33		33		33	33	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	CAPAIAN TAHUN 2019		CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2024	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	
		612	6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x 100%	Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9.09
				Jumlah sistem elektronik	Aplikasi	33		33		33		33		33		33	
		613	7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah x 100%	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.25	1	6.25
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	Layanan	16		16		16		16		16		16	
		614	8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah x 100%	OPD	1	1.56	1	1.56	4	6.25	0	0.00	3	4.69	10	15.63
				Jumlah perangkat daerah	OPD	64		64		64		64		64		64	
		615	9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah x 100%	OPD	1	1.56	1	1.56	1	1.56	3	4.69	8	12.50	8	12.50
				Jumlah perangkat daerah	OPD	64		64		64		64		64		64	
		616	10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya x 100	OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah perangkat daerah	OPD	33		33		33		33		33		33	
		617	11 Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai x 100%	Aplikasi	0	0	0	0	0	0	2	6.06	12	36.36	12	36.36
				Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	Aplikasi	33		33		33		33		33		33	
		618	12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city x 100%	OPD	0	0	0	0	0	0	2	3.13	23	35.94	23	35.94
				Jumlah perangkat daerah	OPD	64		64		64		64		64		64	
		619	13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo x 100%	ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	CAPAIAN TAHUN 2019		CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2024	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	
				Jumlah ASN pengelola TIK	ASN	3		3		3		3		3		3	
		620	14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/tidak	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		621	Persentase masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda kab/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, @mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Orang	172,193	66.53	186,586	72.60	248,081	96.53	195,029	73.24	130,639	49.78	182,566	68.34
				Jumlah penduduk	Jiwa	258,807		257,011		257,011		266,299		262,439		267,139	
		622	1 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Σ Komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	Komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada data
				Σ Komunitas masyarakat atau Mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi	Komunitas	0		0		0		0		0		0	
		623	2 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Σ Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Konten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada data
				Σ Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Konten	0		0		0		0		0		0	
		624	3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Σ Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP	Diseminasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada data
				Σ Diseminasi dan layanan informasi publik	Diseminasi	0		0		0		0		0		0	
		625	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi	Jumlah KIM	Kelompok	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	35.71	18	62.07	28	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	CAPAIAN TAHUN 2019		CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2024	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	
			Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	Kecamatan	28		28		28		28		29		28	
		626	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km2	3,265	53.25	3,486	60.30	4,150	65.28	4,250	69.81	4,500	73.92	4728.84	77.28
				Luas Wilayah Keseluruhan	Km2	#####		#####		#####		#####		#####		6,118.72	
		627	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon x 100%	Orang	86,096	33.80	93,293	36.30	124,040	47.50	97,514	36.62	65,319	24.89	234	87.41
				Jumlah penduduk	Orang	254,695		257,011		261,116		266,299		262,439		267	
		628	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Tidak ada data
				Jumlah rumah tangga	Rumah Tangga	0		0		0		0		0		0	
		629	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	Tidak ada data
				Jumlah rumah tangga	Rumah Tangga	0		0		0		0		0		0	
	Statistik	686	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) x 100%	OPD	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100
				Jumlah OPD	OPD	61		61		61		61		61		61	
		687	1 Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Buku	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		688	2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	Kegiatan	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata
		689	3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kegiatan	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata
		690	4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kegiatan	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	CAPAIAN TAHUN 2019		CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2024	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	
		691	5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kegiatan	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata
		692	6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral x 100%	Dokumen	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	61	100	61	100	61	100	61	100
				Jumlah kegiatan Statistik sektoral 100%	Dokumen	Tidak Ada Data		Tidak Ada Data		61		61		61		61	
		693	7 Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral x 100%	Dokumen	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	61	100	61	100	61	100	61	100
				Jumlah Indikator Statistik sektoral 100%	Dokumen	Tidak Ada Data		Tidak Ada Data		61		61		61		61	
		694	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah) x 100%	OPD	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100
				Jumlah OPD	OPD	61		61		61		61		61		61	
		695	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Sistem	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		696	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		697	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		697.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		Poin	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	Persandian	698	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100%	OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				Jumlah Area penilaian	OPD	33		33		33		33		33		33	
		699	1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100%	OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				Jumlah Area penilaian	OPD	33		33		33		33		33		33	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	CAPAIAN TAHUN 2019		CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2021		CAPAIAN TAHUN 2022		CAPAIAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2024	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	
		700	2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian x 100%	Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah SE yang ada	Aplikasi	8		8		8		8		8		0	
		701	3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah x 100%	Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				Jumlah SE yang ada	Aplikasi	8		8		8		8		8		0	
		702	4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramkan x 100%	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				Jumlah titik pada PHKS	Lokasi	0		0		0		0		0		0	
		703		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah x 100%	OPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				jumlah total perangkat daerah	OPD	33		33		33		33		33		33	
		703.1		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah		%										0	0.00

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk memberikan manfaat kepada berbagai kelompok sasaran yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kelompok sasaran pertama adalah masyarakat umum, yang menjadi penerima utama layanan komunikasi publik, penyebaran informasi, serta kegiatan literasi digital. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah.

Kelompok kedua yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjadi pengguna layanan teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan sistem aplikasi pemerintahan. Layanan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan meningkatkan efisiensi kerja antar-perangkat daerah.

Selain itu, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), PPID, dan lembaga penyiaran publik menjadi mitra strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Peran mereka sangat penting dalam membantu penyebaran informasi serta mendorong partisipasi masyarakat terhadap berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Adapun media massa lokal, baik cetak, elektronik, maupun daring, merupakan pihak yang turut berperan dalam menyampaikan informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat secara luas. Melalui sinergi dengan media, pesan-pesan pembangunan dapat tersampaikan secara efektif dan transparan.

Secara keseluruhan, penetapan kelompok sasaran layanan Diskominfo menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahun. Melalui pemetaan sasaran yang tepat, setiap layanan diharapkan dapat menjangkau penerima manfaat secara optimal, baik dalam peningkatan akses informasi, penguatan tata kelola teknologi informasi pemerintahan, maupun perluasan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan hasil yang lebih terukur dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang informatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam menjalankan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe menjalin kerjasama yang baik dengan media lokal dalam upaya penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kerjasama yang terjaga ini bertujuan untuk menjaga konsistensi Pemerintah Daerah dalam komitmennya

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kerjasama dengan media dan komunitas informasi lainnya juga bertujuan untuk memperluas akses semua pemangku kepentingan terhadap informasi publik serta meningkatkan kualitas informasi publik yang dipublikasikan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe telah menjalin kerja sama strategis dengan Pengadilan Agama (PA) Kelas 1B Unaaha melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28 Mei di Aula Pengadilan Agama Unaaha. MoU ini ditandatangani oleh Ketua PA Unaaha, Sudirman M, S.H.I., M.E., dan Kepala Dinas Kominfo Konawe, Drs. H. Akib Ras, M.Si. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi layanan publik yang tersedia di lingkungan PA Unaaha, khususnya melalui pemanfaatan media digital seperti videotron milik Pemerintah Kabupaten Konawe. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat Kabupaten Konawe dapat memperoleh informasi hukum dan pelayanan peradilan secara lebih cepat, luas, dan efisien, sejalan dengan prinsip transparansi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah Konawe mencakup berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah secara merata. Dengan keterlibatan berbagai pihak, proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap kondisi aktual daerah. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana langsung di lapangan memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, sementara pemerintah provinsi dan nasional dapat memberikan perspektif makro yang berkaitan dengan kebijakan strategis, program prioritas, serta keterkaitan antar wilayah. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa isu-isu pembangunan yang dihadapi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih luas dan terintegrasi, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara merata di seluruh wilayah.

Selain itu, proses dialog antar level pemerintahan ini juga menjadi sarana penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, menghindari tumpang tindih program, serta memperkuat sinergi pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan stakeholder dari berbagai kalangan, diharapkan dapat diperoleh kesepakatan atas permasalahan pokok yang harus segera ditangani dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Dengan

demikian, perencanaan pembangunan daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap dinamika nasional, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah pusat.

Pemetaan permasalahan daerah berfungsi untuk penentuan tujuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II 9 Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Isu Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis digital	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan digital	Pelaksanaan SPBE belum optimal
			Transformasi digital dan SPBE lambat
			Belum optimalnya peran PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan digital
			Belum optimalnya peran KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah
			Pemanfaatan kemitraan dengan media dalam publikasi dan penyebarluasan informasi masih belum maksimal
			Belum optimal pemanfaatan portal berita daerah.
			Transformasi digital dan inovasi daerah belum maksimal
2	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral Kab. Konawe	Ketersediaan data sektoral masih kurang efisien dalam hal proses pengumpulan data	Insfrastruktur TIK tidak merata
			kapasitas ASN dan masyarakat rendah
			Kelembagaan inovasi lemah
3	Belum optimalnya kualitas keamanan informasi pemerintah daerah	Keterbatasan SDM dan sarana prasarana dalam bidang keamanan informasi	Belum optimalnya sistem pengelolaan data statistik sektoral ditingkat produsen data
			Kompetensi SDM dalam bidang keamanan informasi yang masih minim
			Peralatan dan aplikasi yang digunakan untuk bidang keamanan informasi masih minim

Reformasi birokrasi berjalan lambat terlihat dari Tata kelola pemerintahan belum menunjukkan kinerja yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal. Pelayanan publik masih menghadapi kendala dalam kecepatan, keterbukaan informasi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital dan inovasi layanan publik juga belum berjalan maksimal. Infrastruktur TIK belum merata, kapasitas ASN dalam pemanfaatan teknologi masih terbatas,

dan belum terbentuk ekosistem inovasi yang mendukung percepatan pelayanan dan pengambilan kebijakan.

Indeks integritas dan indeks birokrasi masih menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis bukti dan data yang akurat. Penyusunan proyek pembangunan belum memperhatikan kesinambungan jangka panjang.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan Masyarakat. Seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II 10 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah

Urusan Pemerintahan	Permasalahan Utama
Komunikasi dan Informatika	Masih ada OPD yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan layanan internet milik Kominfo
	Keterbatasan cakupan telekomunikasi di beberapa wilayah

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Isu Global

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak tahun 2015, sebagai kelanjutan dari program Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir di tahun 2015. SDGs menjadi pedoman bersama untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dunia seperti kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan dengan prinsip *"no one left behind"* (tidak ada satu pun yang ditinggalkan).

SDGs bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara umum, SDGs terbagi dalam 17 tujuan utama yang saling terkait. Berikut

daftaranya:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*)
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)
10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)
13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)
14. Ekosistem Laut (*Life Below Water*)
15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*)
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*)
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Selain itu, ada beberapa karakteristik SDGs yang sangat penting, antara lain:

1. Universal : berlaku untuk semua negara, baik maju maupun berkembang.
2. Terintegrasi : tujuan-tujuan ini saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri.
3. Partisipatif : melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan organisasi internasional.
4. Berorientasi Masa Depan – tidak hanya fokus pada masalah saat ini, tetapi juga dampak jangka panjang.

Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat penting dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. SDGs dirancang untuk menjadi pedoman pembangunan jangka panjang hingga tahun 2030, di mana setiap negara diharapkan dapat menyesuaikan target dan indikatornya dengan kondisi serta prioritas nasional masing-masing. Dengan adanya SDGs, pembangunan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup, kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.

Dengan demikian, SDGs juga mendorong kolaborasi antarnegara, antarinstansi, dan antar berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target-target global tersebut. Partisipasi aktif masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta organisasi non-pemerintah menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi SDGs di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks daerah, pelaksanaan SDGs bisa menjadi solusi strategis dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk isu-isu tenaga kerja, kemiskinan, dan ketimpangan sosial, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar inklusif, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Isu Nasional

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran

- perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam isu kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 Sulawesi memiliki beberapa isu yang menjadi perhatian pusat yaitu :

1. Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah
2. Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan
3. Pembangunan sarana dan prasarana
4. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja
5. Laju deforestasi dan resiko bencana
6. Akses pendidikan dan kesehatan

3. Isu Regional

Dalam Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat beberapa isu yang

menjadi fokus tahun 2025-2029 yakni :

1. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif.
2. Penurunan Angka Kemiskinan
3. Mengurangi Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah
4. Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Belum Optimal
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
6. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya
7. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik
8. Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan

4. Isu KLHS RPJMD Konawe Tahun 2025-2029

Dalam KLHS RPJMD Konawe tahun 2025-2029 terdapat beberapa isu yang menjadi rekomendasi agar dapat diinternalisasikan ke dalam dokumen RPJMD Konawe yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk
2. Penurunan angka kemiskinan yang masih tinggi dikalangan penduduk
3. Peningkatan distribusi dan konektivitas sarana, prasaranan, serta infrastruktur dasar wilayah
4. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi secara optimal dengan daya dukung wilayah
5. Pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta fungsi jasa lingkungan hidup yang berkelanjutan

2.2.3. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Latar belakang munculnya isu strategis di lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berakar dari pentingnya merespons berbagai perubahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik di daerah. Isu strategis disusun untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama, potensi yang belum tergarap, serta kesenjangan antara kondisi eksisting dengan target pembangunan yang ingin dicapai. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, SKPD harus mampu menyesuaikan program dan kebijakan berdasarkan dinamika lingkungan internal dan eksternal, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global, agar arah pembangunan tetap relevan dan berdampak.

Selain itu, isu strategis juga muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan program di periode sebelumnya, di mana ditemukan kelemahan, ketidakefisienan, atau kebutuhan

akan inovasi dalam pelayanan publik. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan yang semakin tinggi, juga mendorong SKPD untuk merumuskan isu-isu penting yang harus ditangani secara prioritas. Dengan memahami isu strategis secara komprehensif, SKPD dapat menyusun rencana yang lebih terfokus, terarah, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah secara optimal.

Tabel II 11 Penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBA L	NASIONAL	REGIONAL	
Pengembangan infrastruktur TIK	Pengadaan infrastruktur masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia	Penyediaan akses internet dan literasi digital di desa dan wilayah blank spot masih terbatas		Perubahan kebijakan nasional terkait digitalisasi	Topografi daerah di desa sulit terjangkau sehingga menghambat pemasangan akses internet	Diperlukan pengembangan infrastruktur TIK yang lebih baik di daerah blankspot dan lemah sinyal
	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Transformasi tata kelola pemerintahan	Pengembangan Teknologi	Tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas		Tata kelola pemerintahan yang baik
Komunikasi Publik	Kurang optimalnya pemanfaatan saluran komunikasi publik milik pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi daerah	Akses informasi yang masih terbatas		Efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah terhadap anggaran kerja sama penyebaran informasi publik		Diperlukannya pemanfaatan saluran komunikasi online atau alternatif yang lebih terjangkau namun tetap memiliki jangkauan yang luas
Pengembangan SDM di Bidang Statistik Sektoral	Kurangnya partisipasi perangkat daerah dalam pemenuhan data statistik sektoral yang dibutuhkan					Pengembangan kompetensi dan keahlian di bidang pengolahan dan pemanfaatan data statistik sektoral

Terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Diskominfo yakni :

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing – masing dengan mengambil langkah – langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Diskominfo Kab. Konawe melalui Bidang Penyelenggaraan e-government, Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, serta Bidang Informasi Komunikasi Publik berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kab. Konawe. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

Membangun sebuah sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan atau instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sesuai Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi.

Dalam hal ini Diskominfo Kab. Konawe berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip – prinsip antara lain :

- a) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang – undang, kepatuhan, dan kepentingan umum

3. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data sebagai bahan perencanaan dan dasar pengambilan kebijakan,, hal ini dikarenakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika didukung dengan data yang mutakhir dan valid yang menggambarkan kondisi sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa – peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat dan akurat. Namun dalam hal ini Diskominfo Kab. Konawe berfungsi sebagai produsen data, sedangkan walid data dalam hal ini berada pada Bappeda Kab. Konawe.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Diskominfo Kab. Konawe melalui bidang penyelenggaraan e-government mempunyai strategi meningkatkan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kab. Konawe.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**3.1. Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten Konawe, serta menjawab tantangan dan harapan masyarakat menuju masa depan yang lebih sejahtera, Bupati Konawe periode 2025–2029 menetapkan visi dan misi sebagai landasan arah pembangunan daerah. Visi dan misi ini dirumuskan berdasarkan potensi unggulan daerah, dinamika sosial-ekonomi, serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dengan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Visi dan misi ini menjadi pedoman strategis dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan Konawe yang hendak dicapai periode tahun 2025-2029 adalah:

“KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

BERDAYA SAING

Kabupaten Konawe memiliki kemampuan untuk bersaing secara efektif di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Ini mencakup keunggulan dalam produktivitas, inovasi, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

SEJAHTERA

Masyarakat Konawe menikmati kualitas hidup yang baik, termasuk kemakmuran ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan dasar serta kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

ADIL

Pembangunan dan kesejahteraan didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Kabupaten Konawe, tanpa diskriminasi. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

BERKELANJUTAN

Pembangunan Konawe dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Kemajuan yang akan dicapai saat ini tidak akan mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

a. Misi

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, diperlukan misi-misi strategis yang menjabarkan langkah-langkah nyata dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Misi disusun sebagai penjabaran operasional dari visi, agar setiap aspek pembangunan memiliki fokus dan arah yang selaras dengan tujuan jangka panjang daerah. Misi-misi ini mencerminkan komitmen Bupati Konawe periode 2025–2029 dalam menjawab berbagai tantangan daerah, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta memastikan seluruh kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui misi yang terstruktur dan berorientasi hasil, diharapkan pembangunan Konawe dapat dilaksanakan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Misi tercapainya visi tersebut dirumuskan dalam 6 misi utama pembangunan Konawe sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi
3. Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif
4. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antarumat beragama
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota
6. Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Dari keenam misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pada misi ke 3, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi III : Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif

Untuk mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Konawe akan menerapkan sistem e-government yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten. Sistem ini akan mencakup platform pelaporan dan pemantauan proyek pembangunan secara real-time, yang dapat diakses oleh

masyarakat. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, akan dibentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan program pembangunan.

Pelatihan kepemimpinan dan manajemen publik akan diberikan secara rutin kepada aparatur pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Untuk mendorong inovasi dalam tata kelola, akan diadakan kompetisi tahunan antar desa dan kecamatan dalam mengimplementasikan program pembangunan yang kreatif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta budaya pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe secara menyeluruh.

3.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisasisasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe Tahun 2025-2045.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar, maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe tahun 2025-2029 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Adapun tujuannya meliputi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas layanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan Indikator : (1) Nilai SAKIP OPD berdasarkan Hasil Evaluasi Internal APIP; (2) Indeks Pemerintahan Digital; (3) Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan dan standar keamanan informasi.

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran :

- 1) Meningkatnya respon dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi digital, dengan Indikator : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi layanan publik digital
- 2) Meningkatnya kualitas dan integrasi aplikasi informatika, dengan indikator : Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan
- 3) Meningkatnya kapasitas dan koordinasi antar-opd, dengan indikator : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
- 4) meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, dengan indikator : Tingkat keamanan informasi pemerintah

Tabel III 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas layanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian		Nilai SAKIP OPD berdasarkan Hasil Evaluasi Internal APIP	Nilai	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00		
			Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1.50	1.70	1.90	2.00	2.00	2.00		
			Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan dan standar keamanan informasi	Persen	100	100	100	100	100	100		
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perencanaan Kinerja	Nilai	22.10	23.39	22.68	22.98	23.27	23.56		
			Pengukuran Kinerja	Nilai	23.62	23.93	24.24	24.55	24.86	25.17		
			Pelaporan Kinerja	Nilai	12.11	12.27	12.43	12.59	12.75	12.91		
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	18.17	18.41	18.65	18.88	19.12	19.36		
		Meningkatnya respon dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi digital	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi Layanan Publik Digital	Persen	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
		Meningkatnya Kualitas dan Integrasi Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan	Persen	25	37.5	44	50.0	56	62.5		

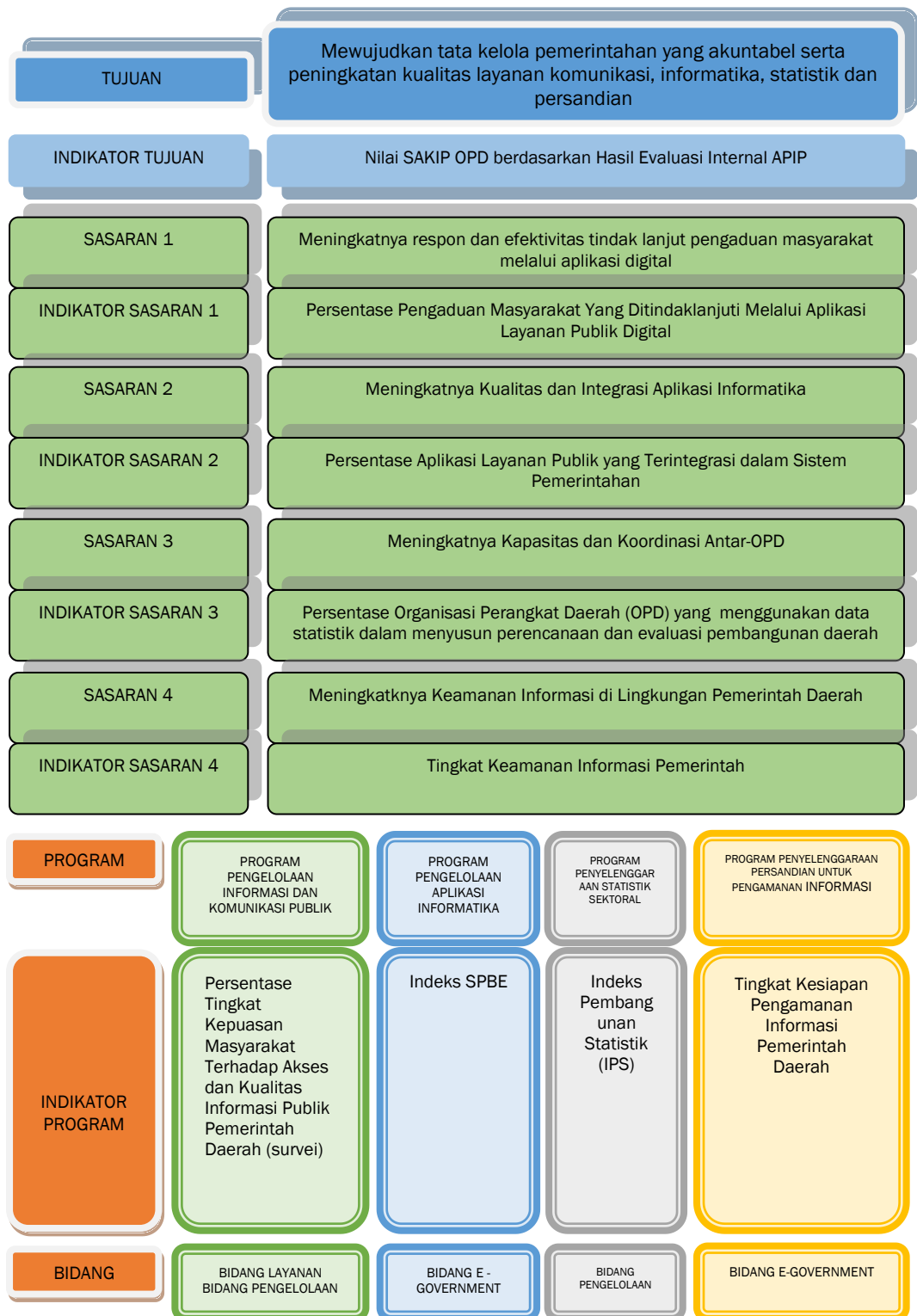
NSPK	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kapasitas dan Koordinasi Antar-OPD	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Level	0	3.0	3.5	4	4	4.5	

3.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis dan / atau target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara vertikal dari atas kebawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Penyusunan pedoman cascading target kinerja dilandasi sebagai berikut :

1. Adanya kebutuhan instansi dalam menerapkan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
2. Adanya kebutuhan untuk perencanaan kerja secara rinci dan mendetail dalam jangka panjang dalam penerapan sistem manajemen kinerja ASN;
3. Adanya kebutuhan untuk penerapan sistem manajemen kinerja

Adapun cascading berdasarkan IKU sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 4 Cascading

Tabel III 2 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe dengan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 - 2029

TUJUAN RPJMD					RPJMD KABUPATEN KONawe TAHUN 2025 - 2029	
Meningkatkan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif						
SASARAN RPJMD						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi						
INDIKATOR SASARAN						
Indeks Reformasi hukum						
Nilai SAKIP						
Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)						
Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
Kepatuhan Pelayanan Publik						
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN						
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE						
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI			PENANGGUNGJAWAB

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas layanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Nilai SAKIP OPD berdasarkan Hasil Evaluasi Internal APIP	<i>Perhitungan dilakukan oleh APIP Pemda, dan ditetapkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Internal</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe	
	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks Pemerintahan Digital = $\sum (TK_i \times TB_i)$ (dari i=1 sampai n)		
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan dan standar keamanan informasi	$= \left\{ \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menerapkan kebijakan dan standar keamanan informasi}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \right\} \times 100\%$		
	Meningkatnya respon dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi digital	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi Layanan Publik Digital		$\text{Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Digital} = \left\{ \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi}}{\text{Jumlah Total Pengaduan Yang Diterima Melalui Aplikasi}} \right\} \times 100\%$
	Meningkatnya Kualitas dan Integrasi Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan		$\text{Persentase Aplikasi Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan} = \left[\frac{\text{Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah Total Aplikasi Layanan Publik}} \right] \times 100\%$

	Meningkatnya Kapasitas dan Koordinasi Antar-OPD	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	$\text{Persentase OPD yang Telah Terintegrasi dalam Sistem Informasi Statistik Daerah/Satu Data} = \left[\frac{\text{Jumlah OPD Terintegrasi Satu Data}}{\text{Total OPD}} \right] \times 100\%$	
	Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	$\text{Indeks Keamanan Informasi Pemerintah} = \left[\frac{\text{Total Nilai Seluruh Domain}}{\text{Total Skor Maksimum}} \right] \times 100\%$	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Adapun strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral melalui rencana pengumpulan data yang terstruktur, pemantauan kualitas data, transparansi dalam metodologi, validasi dan verifikasi data;
3. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Untuk dapat menjalankan Strategi tersebut di atas, maka perlu di buat rencana rencana tahapan agar tercapai Visi yang telah di tetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk periode 2025-2030. Rencana Tahapan (Prioritas Pembangunan) dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Konawe dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel III 3 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Konawe Tahun 2025 - 2029

<i>Tahap I (2026)</i>	<i>Tahap II (2027)</i>	<i>Tahap III (2028)</i>	<i>Tahap IV (2029)</i>	<i>Tahap V (2030)</i>
1	2	3	4	5
<i>Penguatan Infrastruktur Dasar dan Literasi Digital</i>	<i>Digitalisasi Ekonomi Daerah dan Inovasi Teknologi</i>	<i>Penguatan E-Government dan Komunikasi Publik Partisipatif</i>	<i>Smart City, Smart Village, dan Infrastruktur Digital Berkelanjutan</i>	<i>Konsolidasi Transformasi Digital untuk Konawe Berdaya Saing</i>

Pentahapan Pembangunan merupakan langkah strategis yang menjadikan prioritas pembangunan tahunan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah. Uraian Pentahapan yang akan di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

TAHAP I (2025) : Penguatan Infrastruktur Dasar dan Literasi Digital

Pada tahap pertama, Dinas Kominfo berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur telekomunikasi dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Prioritas meliputi pembangunan dan optimalisasi BTS, perluasan jaringan internet desa, serta penyediaan akses jaringan bagi sekolah dan fasilitas kesehatan. Selain itu, dilakukan penguatan literasi digital bagi masyarakat, guru, siswa, tenaga kesehatan, serta pelatihan keamanan data dan etika digital. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi informasi.

TAHAP II (2026): Digitalisasi Ekonomi Daerah dan Inovasi Teknologi

Pada tahap ini, Dinas Kominfo berperan mendorong transformasi digital ekonomi daerah melalui pengembangan program UMKM Go Digital, pemasaran online, dan pembayaran digital. Kominfo juga mengembangkan portal informasi potensi ekonomi daerah dan sistem informasi harga komoditas berbasis data real-time untuk mendukung petani, nelayan, dan pelaku usaha daerah. Ekosistem inovasi teknologi diperkuat melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, startup, dan komunitas teknologi.

TAHAP III (2027): Penguatan E-Government dan Komunikasi Publik Partisipatif

Pada tahap ketiga, fokus diarahkan pada optimalisasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif melalui pengembangan e-government terintegrasi, implementasi layanan perizinan daring, integrasi data antar-OPD, serta penguatan sistem keterbukaan informasi publik melalui PPID. Dinas Kominfo juga memperkuat kanal komunikasi publik dua arah dan meningkatkan literasi informasi masyarakat. Selain itu, publikasi digital terkait budaya daerah dan kearifan lokal menjadi prioritas dalam rangka menjaga ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

TAHAP IV (2028): Smart City, Smart Village, dan Infrastruktur Digital Berkelanjutan

Pada tahap ini, pembangunan infrastruktur TIK diarahkan menuju keberlanjutan dan pemerataan antara wilayah desa dan kota. Dinas Kominfo mengembangkan program Smart Village dan Smart City untuk mendukung digitalisasi administrasi desa, layanan publik, dan pemantauan lingkungan. Pemanfaatan teknologi IoT dikembangkan untuk monitoring banjir, kualitas udara, dan pengelolaan sampah. Selain itu, penyediaan jaringan internet desa

ditingkatkan untuk memastikan seluruh wilayah mendapatkan akses yang merata.

TAHAP V (2029): Konsolidasi Transformasi Digital untuk Konawe Berdaya Saing

Tahap akhir merupakan konsolidasi dari seluruh capaian transformasi digital. Dinas Kominfo memastikan seluruh layanan publik telah terintegrasi melalui platform digital terpadu. Satu Data Konawe berfungsi penuh sebagai basis kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Inklusi digital masyarakat ditingkatkan sehingga seluruh desa memiliki akses internet stabil dan masyarakat memiliki kemampuan literasi digital memadai. Konawe diarahkan menjadi kabupaten berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam semua sektor pembangunan.

B. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Selain Strategi yang harus di kerjakan, Arah kebijakan perlu dilakukan dalam mencapai suatu visi pemerintah karena berperan sebagai panduan strategis yang menjembatani tujuan ideal dalam visi dengan langkah-langkah nyata yang terukur dan terarah. Dengan adanya arah kebijakan, pemerintah dapat menetapkan prioritas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan program, meskipun terjadi perubahan situasi atau kepemimpinan. Selain itu, arah kebijakan menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja, sehingga setiap langkah yang diambil tetap selaras dengan tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan.

Selain itu, arah kebijakan penting untuk menjaga konsistensi, kesinambungan, dan keterpaduan antarprogram lintas sektor maupun lintas wilayah. Dengan adanya arah kebijakan, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dapat terkoordinasi, menghindari tumpang tindih, dan memudahkan proses evaluasi kinerja. Hal ini juga membantu pemerintah beradaptasi terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan tanpa kehilangan jalur untuk mewujudkan visi jangka panjang. Dengan kata lain, arah kebijakan memastikan setiap kebijakan operasional tetap selaras dengan tujuan strategis yang telah dirumuskan.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi yang dirumuskan guna mendukung pencapaian setiap misi yang direncanakan oleh kepala daerah. Arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan secara lebih spesifik dan

kontekstual pada level renstra. Arah kebijakan yang perlu dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Tahun 2025 - 2029

<i>Visi</i>	<i>: Konawe Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan</i>	
<i>Misi</i>	<i>: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Partisipatif</i>	
<i>Tujuan</i>	<i>: Meningkatkan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif</i>	
<i>Sasaran</i>	<i>: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi</i>	
<i>No</i>	<i>Arah Kebijakan RPJMD</i>	<i>Arah Kebijakan Renstra PD</i>
1	<i>Penerapan SPBE untuk layanan perizinan, pajak, NIK, SP4NLAPOR, dan e-procurement; integrasi data (Satu Data Konawe)</i>	1 <i>Penguatan Tata Kelola SPBE Terintegrasi</i>
		2 <i>Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Digital Pemerintah Daerah</i>
		3 <i>Implementasi dan Optimalisasi Layanan SPBE Prioritas Daerah</i>
		4 <i>Penguatan Integrasi Data melalui Program Satu Data Konawe</i>
		5 <i>Peningkatan Keamanan Siber dan Keandalan Sistem Pemerintahan Digital</i>
		6 <i>Peningkatan Kapasitas SDM TIK Pemerintah Daerah</i>
		7 <i>Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan untuk Transformasi Digital</i>

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN****4.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe memiliki 5 Program sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029. Program pembangunan tersebut diaplikasikan melalui kegiatan sampai dengan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang pendanaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe terdiri atas :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan bidang komunikasi dan informatika, maka dalam tahun 2025 – 2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe akan melaksanakan 5 Program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Konawe 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel IV 1 Matriks Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Tahun 2025 - 2029

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2024)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VISI : KONawe YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN																		
III	MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKIF DAN PARTISIPATIF																		
3.1	Meningkatkan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif																		
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	65.82	68.00	68.00	71.00	71.00	73.00	73.00	76.00	76.00	79.00	79.00	81.00	81.00		
			Indeks Reformasi Hukum	Nilai	69.01	69.01	69.01	71.00	71.00	74.00	74.00	75.50	75.50	77.00	77.00	78.50	78.50		
			Nilai SAKIP	Nilai	67.27	68.00	68.00	71.00	71.00	73.00	73.00	76.00	76.00	79.00	79.00	81.00	81.00		
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	Nilai	58.00	75.00	75.00	78.00	78.00	81.00	81.00	84.00	84.00	87.00	87.00	90.00	90.00		
			Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3.406	3.550	3.550	3.700	3.700	3.850	3.850	4.000	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500		
			Kepatuhan Pelayan Publik	Nilai	88.87	89.87	89.87	90.37	90.37	90.87	90.87	91.37	91.37	91.87	91.87	92.37	92.37		
3.1.1.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas layanan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian		Nilai SAKIP OPD berdasarkan Hasil Evaluasi Internal APIP	Nilai	75.30	76.00	76.00	77.00	77.00	78.00	78.00	79.00	79.00	80.00	80.00	81.00	81.00		
			Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2.92	1.50	1.50	1.70	1.70	1.90	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
			Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan dan standar kesmanan Informasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3.1.1.1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Perencanaan Kinerja	Nilai	21.90	22.10	22.10	22.39	22.39	22.68	22.68	22.98	22.98	23.27	23.27	23.56	23.56		
			Pengukuran Kinerja	Nilai	23.40	23.62	23.62	23.93	23.93	24.24	24.24	24.55	24.55	24.86	24.86	25.17	25.17		
			Pelaporan Kinerja	Nilai	12.00	12.11	12.11	12.27	12.27	12.43	12.43	12.59	12.59	12.75	12.75	12.91	12.91		
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	18.00	18.17	18.17	18.41	18.41	18.65	18.65	18.88	18.88	19.12	19.12	19.36	19.36		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10,784,761,873.00		5,335,986,420.00		7,049,664,470.00		7,426,097,692.00		7,538,652,573.00		7,856,835,194.00		8,151,176,930.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2024)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATKAN KEPATUHAN PERANGKAT DAERAH DALAM TATA KELOLA ADMINISTRASI, PELAPORAN KINERJA, DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH SECARA TEPAT WAKTU, LENGKAP, DAN SESUAI KETENTUAN	PERSENTASE RATA-RATA KEPATUHAN TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH (47)	%	100.00	4,332,255,823.00	100.00	3,876,334,870.00	100.00	4,109,664,470.00	100.00	4,251,097,692.00	100.00	4,463,652,573.00	100.00	4,686,835,194.00	100.00	4,921,176,930.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Produk Administratif Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Produk Administratif Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diusulkan	Produk	8	46,514,400.00	8	48,000,000.00	11	55,500,000.00	11	58,275,000.00	11	61,188,750.00	11	64,248,187.00	11	67,460,592.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	11,628,600.00	2	12,000,000.00	2	12,000,000.00	2	12,600,000.00	2	13,230,000.00	2	13,891,500.00	2	14,586,075.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5,814,300.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,300,000.00	1	6,615,000.00	1	6,945,750.00	1	7,293,037.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,814,300.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,300,000.00	1	6,615,000.00	1	6,945,750.00	1	7,293,037.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,814,300.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,300,000.00	1	6,615,000.00	1	6,945,750.00	1	7,293,037.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,814,300.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,300,000.00	1	6,615,000.00	1	6,945,750.00	1	7,293,037.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5,814,300.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,300,000.00	1	6,615,000.00	1	6,945,750.00	1	7,293,037.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5,814,300.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	6,300,000.00	1	6,615,000.00	1	6,945,750.00	1	7,293,037.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	-	0	-	1	500,000.00	1	525,000.00	1	551,250.00	1	578,812.00	1	607,752.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	-	0	-	1	2,000,000.00	1	2,100,000.00	1	2,205,000.00	1	2,315,250.00	1	2,431,012.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.10	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	0	-	0	-	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	1	5,512,500.00	1	5,788,125.00	1	6,077,531.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM														PERANGKAT DAERAH
					Kondisi Awal (Tahun 2024)		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Produk Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Produk Administratif Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Produk	4	2,657,117,893.00	20	2,744,170,870.00	21	2,735,170,870.00	21	2,871,929,413.00	21	3,015,525,883.00	21	3,166,302,175.00	21	3,324,617,280.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	490	2,640,787,493.00	490	2,717,170,870.00	490	2,717,170,870.00	490	2,853,029,413.00	490	2,995,680,883.00	490	3,145,464,927.00	490	3,302,738,173.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	4,701,800.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,600,000.00	1	13,230,000.00	1	13,891,500.00	1	14,586,075.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	0	-	1	3,000,000.00	1	3,150,000.00	1	3,307,500.00	1	3,472,875.00	1	3,646,518.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	-	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,050,000.00	1	1,102,500.00	1	1,157,625.00	1	1,215,506.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5,814,300.00	3	6,000,000.00	1	500,000.00	3	525,000.00	3	551,250.00	3	578,812.00	3	607,752.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	-	1	1,000,000.00	1	500,000.00	1	525,000.00	1	551,250.00	1	578,812.00	1	607,752.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semester SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semester teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semester teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	5,814,300.00	12	6,000,000.00	12	500,000.00	12	525,000.00	12	551,250.00	12	578,812.00	12	607,752.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	-	1	1,000,000.00	1	500,000.00	1	525,000.00	1	551,250.00	1	578,812.00	1	607,752.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Produk Administratif Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Produk Administratif Barang Milik Daerah yang diselesaikan	Produk	1	3,981,300.00	4	10,000,000.00	8	5,500,000.00	8	5,775,000.00	8	6,063,750.00	8	6,366,937.00	8	6,685,282.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	2	2,000,000.00	2	1,000,000.00	2	1,050,000.00	2	1,102,500.00	2	1,157,625.00	2	1,215,506.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	1	2,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,050,000.00	1	1,102,500.00	1	1,157,625.00	1	1,215,506.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	3,981,300.00	1	6,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,050,000.00	1	1,102,500.00	1	1,157,625.00	1	1,215,506.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM														PERANGKAT DAERAH
					Kondisi Awal (Tahun 2024)		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	-	0	-	4	2,000,000.00	4	2,100,000.00	4	2,205,000.00	4	2,315,250.00	4	2,431,012.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	0	-	1	500,000.00	1	525,000.00	1	551,250.00	1	578,812.00	1	607,752.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Produk Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Produk Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	Produk	3	21,265,200.00	10	64,802,000.00	11	45,553,750.00	11	47,831,437.00	11	50,223,008.00	11	52,734,157.00	11	55,370,861.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	-	0	-	1	10,000,000.00	1	10,500,000.00	1	11,025,000.00	1	11,576,250.00	1	12,155,062.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	15,000,000.00	1	16,150,000.00	1	16,553,750.00	1	17,381,437.00	1	18,250,508.00	1	19,163,033.00	1	20,121,184.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	-	1	500,000.00	1	500,000.00	1	525,000.00	1	551,250.00	1	578,812.00	1	607,752.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	-	1	12,000,000.00	1	500,000.00	1	525,000.00	1	551,250.00	1	578,812.00	1	607,752.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	6,265,200.00	4	6,000,000.00	4	3,000,000.00	4	3,150,000.00	4	3,307,500.00	4	3,472,875.00	4	3,646,518.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	3	29,952,000.00	3	15,000,000.00	3	15,750,000.00	3	16,537,500.00	3	17,364,375.00	3	18,232,593.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Produk Administratif Umum Perangkat Daerah	Jumlah Produk Administratif Umum Perangkat Daerah yang disusun	Produk	12	445,415,100.00	9	90,397,000.00	13	106,519,850.00	11	105,545,842.00	11	110,823,132.00	11	116,364,287.00	11	122,182,496.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3,377,000.00	1	965,000.00	1	1,000,000.00	1	1,050,000.00	1	1,102,500.00	1	1,157,625.00	1	1,215,506.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	12,834,100.00	1	16,022,000.00	1	16,422,550.00	1	17,243,677.00	1	18,105,860.00	1	19,011,153.00	1	19,961,710.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5,910,000.00	1	5,998,000.00	1	1,000,000.00	1	1,050,000.00	1	1,102,500.00	1	1,157,625.00	1	1,215,506.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2024)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	13,996,000.00	1	5,880,000.00	1	6,027,000.00	1	6,328,350.00	1	6,644,767.00	1	6,977,005.00	1	7,325,855.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7,980,000.00	1	20,660,000.00	1	21,176,500.00	1	22,235,325.00	1	23,347,091.00	1	24,514,445.00	1	25,740,167.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	0	-	1	1,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	1	5,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	401,318,000.00	4	40,872,000.00	4	41,893,800.00	4	43,988,490.00	4	46,187,914.00	4	48,497,309.00	4	50,922,174.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-	1	3,000,000.00	1	3,150,000.00	1	3,307,500.00	1	3,472,875.00	1	3,646,518.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-	1	10,000,000.00	1	10,500,000.00	1	11,025,000.00	1	11,576,250.00	1	12,155,062.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Pengadaan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	0	-	2	13,905,000.00	10	225,000,000.00	9	183,750,000.00	9	192,937,500.00	9	202,584,375.00	9	212,713,591.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	25,000,000.00	1	26,250,000.00	1	27,562,500.00	1	28,940,625.00	1	30,387,656.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	25,000,000.00	1	26,250,000.00	1	27,562,500.00	1	28,940,625.00	1	30,387,656.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.3	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	2	13,905,000.00	2	10,000,000.00	2	10,500,000.00	2	11,025,000.00	2	11,576,250.00	2	12,155,062.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	2	10,000,000.00	2	10,500,000.00	2	11,025,000.00	2	11,576,250.00	2	12,155,062.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.5	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	1	5,512,500.00	1	5,788,125.00	1	6,077,531.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2024)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.6	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	50,000,000.00	1	52,500,000.00	1	55,125,000.00	1	57,881,250.00	1	60,775,312.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	50,000,000.00	1	52,500,000.00	1	55,125,000.00	1	57,881,250.00	1	60,775,312.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	50,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Laporan	6	939,967,700.00	12	834,600,000.00	16	850,700,000.00	16	893,235,000.00	16	937,896,750.00	16	984,791,587.00	16	1,034,031,165.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,527,700.00	4	4,200,000.00	4	3,600,000.00	4	3,780,000.00	4	3,969,000.00	4	4,167,450.00	4	4,375,822.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	836,740,000.00	4	468,000,000.00	4	479,700,000.00	4	503,685,000.00	4	528,869,250.00	4	555,312,712.00	4	583,078,347.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	0	-	4	5,000,000.00	4	5,250,000.00	4	5,512,500.00	4	5,788,125.00	4	6,077,531.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	99,600,000.00	4	362,400,000.00	4	362,400,000.00	4	380,520,000.00	4	399,546,000.00	4	419,523,300.00	4	440,499,465.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	21	218,094,230.00	4	70,660,000.00	10	85,720,000.00	9	84,756,000.00	9	88,993,800.00	9	93,443,489.00	9	98,115,661.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	59,250,000.00	1	55,030,000.00	1	29,962,000.00	1	31,460,100.00	1	33,033,105.00	1	34,684,760.00	1	36,418,998.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	2,100,000.00	0	-	1	29,720,000.00	1	31,206,000.00	1	32,766,300.00	1	34,404,615.00	1	36,124,845.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.3	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	2	1,000,000.00	2	1,050,000.00	2	1,102,500.00	2	1,157,625.00	2	1,215,506.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	141,125,230.00	2	10,750,000.00	2	2,500,000.00	2	2,625,000.00	2	2,756,250.00	2	2,894,062.00	2	3,038,765.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SARANAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SARANAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2024)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	1	1,000,000.00	1	1,050,000.00	1	1,102,500.00	1	1,157,625.00	1	1,215,506.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,739,000.00	0	-	1	11,538,000.00	1	12,114,900.00	1	12,720,645.00	1	13,356,677.00	1	14,024,510.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4,880,000.00	0	-	1	5,000,000.00	1	5,250,000.00	1	5,512,500.00	1	5,788,125.00	1	6,077,531.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	4,880,000.00	1	5,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.1.1.1.2	Meningkatnya respon dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi digital		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi Layanan Publik Digital	Persen	0.00	50.00	50.00		60.00		70.00		80.00		80.00		80.00		
3.1.1.1.3	Meningkatnya Kualitas dan Integrasi Aplikasi Informatika		Persentase Aplikasi Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan	Persen	12.5		25		37.5		44		50		56		62.5		
3.1.1.1.4	Meningkatnya Kapasitas dan Koordinasi Antar-OPD		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam merencanakan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		
3.1.1.1.5	Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat keamanan Informasi pemerintah	Level	0	0	0		3		3.5		4.0		4.0		4.5		
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS KOMUNIKASI PUBLIK KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KEPULUSAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (SURVEI)	%	100.00	4,951,443,250.00	50.00		65.00	1,275,000,000.00	75.00	1,475,000,000.00	85.00	1,655,000,000.00	95.00	1,745,000,000.00	100.00	1,725,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TERLAKSANNANYA PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMDA KAB/KOTA	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	Orang	1	4,951,443,250.00	5	985,283,550.00	5	1,275,000,000.00	6	1,475,000,000.00	7	1,655,000,000.00	8	1,745,000,000.00	9	1,725,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.1	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	1	4,453,443,950.00	8	149,785,700.00	8	210,000,000.00	8	300,000,000.00	8	400,000,000.00	8	480,000,000.00	8	400,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendemonstrasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1	54,951,300.00	28	45,893,000.00	28	150,000,000.00	42	200,000,000.00	56	250,000,000.00	56	250,000,000.00	56	250,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2024)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	0	-	0	-	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.4	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pemohonan	1	291,304,500.00	12	43,097,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.5	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	100.00	6,006,800.00	0.00	-	100.00	150,000,000.00	100.00	150,000,000.00	100.00	150,000,000.00	100.00	150,000,000.00	100.00	150,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.6	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	23,041,200.00	12	25,918,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.7	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	0.00	-	100.00	24,137,000.00	100.00	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.8	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/puknis	Media	1	24,760,000.00	1	598,849,850.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	6	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.9	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	0	-	1	32,675,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.10	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	0	-	50	49,952,000.00	50	100,000,000.00	60	150,000,000.00	70	150,000,000.00	80	150,000,000.00	90	200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	1	97,935,500.00	5	14,976,000.00	5	50,000,000.00	6	60,000,000.00	7	70,000,000.00	8	80,000,000.00	9	90,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	MENINGKATKANNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	INDEKS SPBE	INDEKS	2.92	1,471,062,800.00	3.00	378,281,000.00	3.50	1,085,000,000.00	4.00	1,085,000,000.00	4.50	760,000,000.00	5.00	710,000,000.00	5.00	710,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki Sub Domain dan Portal OPD	OPD	34	30,000,000.00	0	-	34	150,000,000.00	64	150,000,000.00	64	25,000,000.00	64	25,000,000.00	64	25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Dokumen Pemerintah Desa	Dokumen	1	30,000,000.00	0	-	30	150,000,000.00	30	150,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya E-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	OPD	34	1,441,062,800.00	34	378,281,000.00	34	935,000,000.00	64	935,000,000.00	64	735,000,000.00	64	685,000,000.00	64	685,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM														PERANGKAT DAERAH
					Kondisi Awal (Tahun 2024)		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.1	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	30	127,200,000.00	1	80,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	200,000,000.00	3	9,362,000.00	3	300,000,000.00	3	300,000,000.00	1	100,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	29	199,000,000.00	0	-	33	25,000,000.00	33	25,000,000.00	33	25,000,000.00	33	25,000,000.00	33	25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.4	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	0	-	0	-	16	10,000,000.00	16	10,000,000.00	16	10,000,000.00	16	10,000,000.00	16	10,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.5	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	0	-	0	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.6	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	0	-	2	66,699,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.7	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	4	652,248,700.00	0	-	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1	200,000,000.00	1	100,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.9	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	0	-	2	38,592,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10	Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	0	-	0	-	64	50,000,000.00	64	50,000,000.00	64	50,000,000.00	64	50,000,000.00	64	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.11	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	0	-	1	55,408,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.12	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	62,614,100.00	0	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2024)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.13	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	0	-	1	28,220,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI, DAN STANDARDISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)	INDEKS	1.97	-	0	-	2.6	380,000,000.00	40	415,000,000.00	42	460,000,000.00	45	500,000,000.00	45	580,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	MENINGKATNYA KUALITAS STATISTIK SEKTORAL	MENINGKATNYA KUALITAS STATISTIK SEKTORAL	Laporan	0	-	0	-	6	380,000,000.00	6	415,000,000.00	6	460,000,000.00	6	500,000,000.00	6	580,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.1	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	0.00	-	0.00	-	100.00	75,000,000.00	100.00	80,000,000.00	100.00	85,000,000.00	100.00	90,000,000.00	100.00	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.2	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	0.00	-	0.00	-	100.00	60,000,000.00	100.00	65,000,000.00	100.00	75,000,000.00	100.00	80,000,000.00	100.00	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.3	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	0.00	-	0.00	-	2.00	75,000,000.00	2.00	80,000,000.00	2.00	85,000,000.00	2.00	90,000,000.00	2.00	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	0	-	0	-	30	60,000,000.00	30	65,000,000.00	30	70,000,000.00	30	80,000,000.00	30	90,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	0.00	-	0.00	-	100.00	60,000,000.00	100.00	65,000,000.00	100.00	75,000,000.00	100.00	80,000,000.00	100.00	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.6	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	0	-	0	-	1	50,000,000.00	1	60,000,000.00	1	70,000,000.00	1	80,000,000.00	1	90,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH	%	0.00	30,000,000.00	100.00	96,087,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00	215,000,000.00	100.00	215,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Persandian Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Program Persandian untuk pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Laporan	0	-	36	96,087,000.00	36	150,000,000.00	36	150,000,000.00	36	150,000,000.00	36	165,000,000.00	36	165,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	0	-	1	18,921,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.2	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	0	-	1	18,952,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2024)		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM												PERANGKAT DAERAH
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030 (Kondisi Akhir)		
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	0	-	33	50,000,000.00	33	50,000,000.00	33	50,000,000.00	33	50,000,000.00	33	50,000,000.00	33	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	0	-	1	8,214,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam Layanan Komunikasi Sandi	OPD	34	30,000,000.00	0	-	64	50,000,000.00	64	50,000,000.00	64	50,000,000.00	64	50,000,000.00	64	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	1	30,000,000.00	0	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel IV 2 Perumusan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET						
1	2	3	4	5	6	7	8						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas layanan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian					1	Nilai SAKIP OPD berdasarkan Hasil Evaluasi Internal APIP							
					2	Indeks Pemerintahan Digital							
					3	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan dan standar keamanan informasi							
					Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Perencanaan Kinerja						
						2	Pengukuran Kinerja						
						3	Pelaporan Kinerja						
						4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
					Meningkatnya respon dan efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi digital						Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi Layanan Publik Digital		
											Persentase tingkat Kepuasan masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
											Terlaksananya penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda kab/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
											Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers 2. terdaftar di Dinas Kominfo 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media
											Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas informasi Masyarakat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan informasi publik	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber daya manusia Komunikasi Publik	
				Meningkatnya Kualitas dan Integrasi Aplikasi Informatika			Persentase Aplikasi Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi Informatika		Indeks SPBE		Pengelolaan Aplikasi Informatika	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki Sub Domain dan Portal OPD	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terlaksananya E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
				Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	
				Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Meningkatnya Kapasitas dan Koordinasi Antar-OPD			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		
			Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	
				Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	
				Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
		Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		
			Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi lingkungan Pemerintah		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			daerah	Terseleenggaranya Program Persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Layanan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam Layanan Komunikasi Sandi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Tabel IV 3 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Relasi Media 2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 3 Pelayanan Informasi Publik 4 Diseminasi Informasi 5 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 6 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 7 Penyusunan Konten 8 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 	Termasuk pengelolaan media pemerintah daerah, PPID, monitoring opini dan konten strategis
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terwujudnya e-government, SPBE, dan digitalisasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 2 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 3 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 4 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 5 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 	Mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik dan inklusi digital SMART city

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			6 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			7 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
			8 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			9 Penyediaan Akses Internet	
3	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Tersedianya data yang valid dan tepat waktu dalam mendukung pengambilan kebijakan	1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah dalam Mengelola Data Statistik Sektoral	2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Terhadap Operator Pengolah Data di Perangkat Daerah

Tabel IV 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030 (Kondisi Akhir)
		KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi Layanan Publik Digital	%	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00	80.00
Persentase Aplikasi Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan	%	25.00	37.5	44.00	50.00	56.00	62.50
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.00	100.00
Tingkat keamanan informasi pemerintah	Level	0	3.0	3.5	4	4	4.5

Tabel IV 5 Capaian IKK 2025 – 2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	TARGET TAHUN 2025		TARGET TAHUN 2026		TARGET TAHUN 2027		TARGET TAHUN 2028		TARGET TAHUN 2029		TARGET TAHUN 2030	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
-1	-2	-3	-4	-5		-12		-7		-8		-9		-10		-10	
16	Kominfo	602	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	x	100%	OPD	30	81	32	86	34	92	36	97	37	100
				Jumlah OPD	OPD	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
		603	1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang di sediakan oleh dinas kominfo	x	100%	OPD	27	82	30	91	33	100	33	100	33	100
				Jumlah perangkat daerah	OPD	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		604	2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	x	100%	OPD	27	82	30	91	33	100	33	100	33	100
				Jumlah perangkat daerah	OPD	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		605	3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).			Sistem	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		606	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	x	100%	Layanan	16	100.00	16	100.00	16	100.00	16	100.00	16	100.00
				Jumlah Layanan Publik	Layanan	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		607	1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah perangkat daerah (event), Perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan PM Kominfo No./2015	x	100%	OPD	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah	OPD	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
		608	2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	x	100%	OPD	4	6.25	34	53.13	64	100.00	64	100	64	100.00
				Jumlah perangkat daerah	OPD	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
		609	3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	x	100%	OPD	8	12.50	33	51.56	64	100	64	100	64	100.00
				Jumlah perangkat daerah	OPD	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
		610	4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	x	100%	Layanan	16	100.00	16	100	16	100	16	100	16	100
				Jumlah layanan	Layanan	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		611	5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	x	100%	Layanan	5	15.15	7	21.21	9	27.27	11	33.33	13	39.39
				Jumlah sistem elektronik	Aplikasi	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		612	6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	x	100%	Aplikasi	5	15.15	10	30.30	20	60.61	33	100	33	100
				Jumlah sistem elektronik	Aplikasi	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		613	7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	x	100%	Layanan	1	6.25	2	12.5	4	25	6	37.5	10	62.5

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	TARGET TAHUN 2025		TARGET TAHUN 2026		TARGET TAHUN 2027		TARGET TAHUN 2028		TARGET TAHUN 2029		TARGET TAHUN 2030		
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	
-1	-2	-3	-4	-5		-12		-7		-8		-9		-10		-10		
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	Layanan	16		16		16		16		16		16		
		614	8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah x 100%	OPD	10	15.63	27	42.19	64	100.00	64	100.00	64	100.00	64	100.00
				Jumlah perangkat daerah		OPD	64		64		64		64		64		64	
		615	9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah x 100%	OPD	8	12.50	33	51.56	64	100.00	64	100.00	64	100.00	64	100.00
				Jumlah perangkat daerah		OPD	64		64		64		64		64		64	
		616	10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya x 100%	OPD	0	0	10	30.30	20	60.61	33	100	33	100	33	100
				Jumlah perangkat daerah		OPD	33		33		33		33		33		33	
		617	11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai x 100%	Aplikasi	12	36.36	24	72.73	30	90.91	33	100	33	100	33	100
				Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah		Aplikasi	33		33		33		33		33		33	
		618	12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city x 100%	OPD	27	42.19	64	100	64	100	64	100.00	64	100.00	64	100.00
				Jumlah perangkat daerah		OPD	64		64		64		64		64		64	
		619	13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo x 100%	ASN	1	33.33	2	66.67	2	66.67	2	66.67	2	66.67	2	66.67
				Jumlah ASN pengelola TIK		ASN	3		3		3		3		3		3	
		620	14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/tidak	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		621		Persentase masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pmda kab/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, @mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan peimerintah kabupaten/kota x 100%	Orang	184,818	68.36	187,105	68.39	189,426	68.42	191,781	68.44	194,171	68.47	196,597	68.51
				Jumlah penduduk		Jiwa	270,344		273,589		276,875		280,202		283,570		286,980	
		622	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Σ Komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah x 100%	Komunitas	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data
				Σ Komunitas masyarakat atau Mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi		Komunitas	0		0		0		0		0		0	
		623	2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Σ Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) x 100%	Konten	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data
				Σ Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		Konten	0		0		0		0		0		0	
		624	3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Σ Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP x 100%	Diseminasi	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data
				Σ Diseminasi dan layanan informasi publik		Diseminasi	0		0		0		0		0		0	
		625		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah KIM x 100%	Kelompok	30	100	32	100.00	34	100.00	36	100.00	38	100.00	40	100.00
				Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota		Kecamatan	28		28		28		28		28		28	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	TARGET TAHUN 2025		TARGET TAHUN 2026		TARGET TAHUN 2027		TARGET TAHUN 2028		TARGET TAHUN 2029		TARGET TAHUN 2030	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
-1	-2	-3	-4	-5		-12		-7		-8		-9		-10		-10	
		626	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km2	5067.96	82.83	5,067.96	82.83	5,407.08	88.37	5,407.08	88.37	5,407.08	88.37	5,407.08	88.37
				Luas Wilayah Keseluruhan	Km2	6,118.72		6,118.72		6,118.72		6,118.72		6,118.72		6,118.72	
		627	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon x 100%	Orang	236	87.43	240	87.81	244	88.07	248	88.43	251	88.47	256	89.16
				Jumlah penduduk	Orang	270		274		277		280		284		287	
		628	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Rumah Tangga	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data
				Jumlah rumah tangga	Rumah Tangga	0		0		0		0		0		0	
		629	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Rumah Tangga	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data	0	Tidak ada data
				Jumlah rumah tangga	Rumah Tangga	0		0		0		0		0		0	
		629.1	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi		Level	1	1	2	2	2	2	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		629.2	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Level	2	2	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		629.3	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi		Level	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		629.4	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas		Persentase	10	10	20	20	40	40	60.00	60.00	80.00	80.00	100.00	100.00
		629.5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Nilai	60	60	65	65	75	75	80.00	80.00	85.00	85.00	95.00	95.00
20	Statistik	686	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) x 100%	OPD	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100
				Jumlah OPD	OPD	61		61		61		61		61		61	
		687	1 Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Buku	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		688	2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	Kegiatan	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata
		689	3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kegiatan	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata
		690	4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kegiatan	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata
		691	5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kegiatan	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata	Tidak Terdata
		692	6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral x 100%	Dokumen	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100
				Jumlah kegiatan Statistik sektoral 100%	Dokumen	61		61		61		61		61		61	
		693	7 Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral x 100%	Dokumen	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100
				Jumlah Indikator Statistik sektoral 100%	Dokumen	61		61		61		61		61		61	
		694	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah) x 100%	OPD	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100	61	100

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KODE DATA	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	RUMUS / VARIABEL	SATUAN VARIABEL	TARGET TAHUN 2025		TARGET TAHUN 2026		TARGET TAHUN 2027		TARGET TAHUN 2028		TARGET TAHUN 2029		TARGET TAHUN 2030	
						Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel	Indikator
-1	-2	-3	-4	-5		-12		-7		-8		-9		-10		-10	
				Jumlah OPD	OPD	61		61		61		61		61		61	
		695	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Sistem	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		696	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		697	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		697.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		Poin	35	35.00	38	38.00	40	40.00	42	42	45	45	45	45
21	Persandian	698	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100%	OPD	1	03.03	1	03.03	1	03.03	1	03.03	1	03.03	1	03.03
				Jumlah Area penilaian	OPD	33		33		33		33		33		33	
		699	1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100%	OPD	33	100.00	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100
				Jumlah Area penilaian	OPD	33		33		33		33		33		33	
		700	2 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian x 100%	Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah SE yang ada	Aplikasi	0		0		0		0		0		0	
		701	3 Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah x 100%	Aplikasi	33	100.00	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100
				Jumlah SE yang ada	Aplikasi	33		33		33		33		33		33	
		702	4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teraman x 100%	Lokasi	33	100.00	33	100.00	33	100.00	33	100.00	33	100.00	33	100.00
				Jumlah titik pada PHKS	Lokasi	33		33		33		33		33		33	
		703	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah x 100%	OPD	33	100.00	33	100	33	100	33	100	33	100	33	100
				jumlah total perangkat daerah	OPD	33		33		33		33		33		33	
		703.1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah		%	0	0.00	0.62	62.00	0.75	75.00	0.88	88	0.94	93.75	1.00	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk pelaksanaan dari program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Konawe tahun 2025-2029. Dokumen ini berisi rencana yang terukur, berkelanjutan, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan alokasi anggaran yang telah dirancang untuk masing-masing kegiatan. Tujuannya agar proses pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

RENSTRA ini menjadi acuan utama Dinas Kominfo dalam merancang dan melaksanakan program kerja selama lima tahun ke depan. Setiap tahunnya, RENSTRA akan dijabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kominfo, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kondisi keuangan yang tersedia.

Setelah RENSTRA ditetapkan, beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah:

- Seluruh pegawai harus menjalankan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai tugas dan fungsinya agar target RENSTRA tercapai
- Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan RENJA dan RKA SKPD untuk periode 2025–2029
- Evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas bersama tim, dengan mengacu pada hasil evaluasi RENJA.

RENSTRA ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo secara konsisten. Hal ini termasuk peningkatan layanan informasi publik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh pihak dapat memanfaatkannya secara optimal guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kabupaten Konawe tahun 2025–2029.

Unaaha, 2025

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KONawe



Dis. H. Muh. Akib Ras, M.Si
Pembina UtamaMuda, IV/c
NIP. 19670831 199303 1 008